



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 34 K/16/MEM/2020

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi, perlu menetapkan alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi untuk penyediaan tenaga listrik dalam negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

KESATU : Menetapkan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang selanjutnya disebut Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi PT PLN (Persero), yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu kepada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi yang sebelumnya ditetapkan oleh Menteri.

KETIGA : Dalam hal diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan penyediaan tenaga listrik di regional lain dan/atau kebutuhan pembangkit lain, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN (Persero)) dapat menggunakan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan melaporkannya kepada Menteri.

- KEEMPAT : Menteri dapat melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA : Dalam hal Kontrak Kerja Sama antara Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berakhir, penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan tetap berlaku.
- KEENAM : Surat penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang telah terbit dan belum memiliki perjanjian jual beli gas bumi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal terbit surat penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : PT PLN (Persero) dan/atau pembeli gas bumi menyampaikan konfirmasi pengambilan volume Alokasi *Liquefied Natural Gas* (LNG) kepada KKKS dan/atau penjual gas bumi setiap tahun paling lambat pada akhir bulan Oktober sebelum tahun berjalan alokasi.
- KEDELAPAN : Dalam hal PT PLN (Persero) dan/atau pembeli gas bumi mengonfirmasi tidak dapat mengambil volume Alokasi LNG atau tidak menyampaikan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, KKKS dan/atau penjual gas bumi dapat mengajukan permohonan perubahan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk selain penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) kepada Menteri.

KESEMBILAN : PT PLN (Persero) dan/atau pembeli gas bumi harus menyelesaikan perjanjian jual beli gas bumi dengan KKKS dan/atau penjual gas bumi, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KESEPULUH : Dalam hal PT PLN (Persero) dan/atau pembeli gas bumi belum dapat mengoptimalkan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan/atau belum ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, KKKS dan/atau penjual gas bumi dapat mengajukan permohonan perubahan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk selain penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) kepada Menteri.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1750 K/20/MEM/2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1790 K/20/MEM/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1750 K/20/MEM/2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
7. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi
NIP 19601015 19810 3 1002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 K/16/MEM/2020

TANGGAL 3 Februari 2020

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

ALOKASI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI PT PLN (PERSERO)

I. Regional Sumatera

| NO | PERUNTUKAN KEBUTUHAN PEMBANGKIT | SUMBER GAS BUMI | PEMBELI GAS BUMI | SATUAN | VOLUME GAS BUMI PERTAHUN | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Aceh dan Sumatera Utara | LNG Tangguh | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | KARGO | 15,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 |
| | PLTG Arun Peaker PLTGU Sumbagut-2 Peaker PLTG Banda Aceh & MPP Banda Aceh 2 PLTG Payapasir & MPP Sumut MVPP Belawan (sewa) Belawan #3 PLTGU Belawan MPP Nias, PLTMG Nias-2 & Nias-3 Pembangkit Sewa KKA (Aceh) | Wilayah Kerja (WK) North Sumatera Offshore dan WK B | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - |

| NO. | PERUNTUKAN KEBUTUHAN PEMBANGKIT | SUMBER GAS BUMI | PEMBELI GAS BUMI | SATUAN | VOLUME GAS BUMI PERTAHUN | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 9. | PLTG Talang Duku & PLTGU Talang Duku (ST) | WK Corridor, WK South Sumatera, WK Lematang, WK PEP, dan WK Jambi Merang | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | BBTUD | 12,0 | 9,6 | 7,3 | 6,2 | 4,6 | 4,8 | 5,7 | 3,8 | 4,4 | 4,3 |
| 10. | Lampung PLTG MPP Lampung PLTG Tarahan PLTG Sutami PLTGU Lampung Peaker (Sebalang) | WK Corridor, WK South Sumatera, WK Lematang, WK PEP, dan WK Jambi Merang | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | BBTUD | 30,5 | 14,3 | 16,6 | 11,7 | 8,6 | 9,1 | 17,3 | 7,3 | 8,4 | 8,1 |
| 11. | Bangka Belitung dan Pontianak Bangka Belitung PLTG/MG Kalbar (Regional Kalimantan) MPP Kalbar (Regional Kalimantan) | LNG Tangguh/Bontang | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | KARGO | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |

II. Regional Jawa Bali

| NO | PERUNTUKAN KEBUTUHAN PEMBANGKIT | SUMBER GAS BUMI | PEMBELI GAS BUMI | SATUAN | VOLUME GAS BUMI PERTAHUN | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Muara Karang, Priok, dan Muara Tawar | WK Offshore Northwest Java | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - |
| | PLTGU Muara Karang Blok 1-3 | WK Pertamina EP | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - |
| | PLTGU Priok, PLTGU Jawa 2 | WK Jambi Merang | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 10,1 | 5,6 | - | - | - | - | - |
| | PLTGU Muara Tawar | WK Corridor, WK South Sumatera, WK Lematang, WK PEP, dan WK Jambi Merang | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | BBTUD | 195,0 | 117,2 | 121,6 | 105,2 | 110,3 | 109,6 | 86,1 | 83,6 | 81,9 | 82,2 |
| | PLTGU Muara Tawar Add on Blok 2,3,4 | LNG Tangguh | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | KARGO | 5,0 | 35,0 | 32,0 | 34,7 | 33,7 | 29,2 | 32,1 | 32,1 | 25,5 | 25,4 |
| | | LNG Bontang | PT Nusantara Regas | KARGO | 18,0 | 17,0 | 13,0 | 13,0 | - | - | - | - | - | - |
| | | LNG Bontang | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | KARGO | 12,0 | - | - | - | - | - | 8,0 | 20,0 | 34,0 | 43,0 |
| 2. | PLTGU Jawa 1 | LNG Tangguh | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | KARGO | - | - | - | 4,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 3. | Cilegon | WK Corridor, WK South Sumatera, WK Lematang, WK PEP, dan WK Jambi Merang WK | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | BBTUD | 37,2 | 39,9 | 35,5 | 58,0 | 57,5 | 57,5 | 71,9 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
| | | WK Southeast Sumatera | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | 33,0 | 32,0 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | - |

| NO | PERUNTUKAN KEBUTUHAN PEMBANGKIT | SUMBER GAS BUMI | PEMBELI GAS BUMI | SATUAN | VOLUME GAS BUMI PERTAHUN | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------|--------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 4. | Semarang PLTGU/PLTU Tambaklorok, PLTGU Jawa Bali 1 | Lapangan Kepodang, WK Muriah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | 21,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | WK Pertamina EP (Gundih) | PT Sumber Petrindo Perkasa | BBTUD | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| | | Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru, WK Cepu | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | - | - | 22,0 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| | | WK Brantas | PT Pertamina Niaga (via pipa gresem) | BBTUD | - | 12,0 | 27,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | LNG (Tangguh/Bontang/Masela) | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) via FSRU PLN Jatim | KARGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
| 5. | Jawa Timur PLTGU/PLTU Gresik, PLTGU Jawa 3 PLTGU Madura PLTGU Grati PLTGU Blok 1-2 PLTGU Grati Add-On Blok 2 | WK Pangkah | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 19,0 | 12,0 | 9,0 | - | - | |
| | | Lapangan Terang, Sirasun, Batur (TSB), WK Kangean | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| | | Lapangan Peluang, WK Madura Offshore | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | 25,0 | 22,0 | 15,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | |
| | | Lapangan Bukit Tua, WK Ketapang | PT Petrogas Jatim Utama | BBTUD | 18,7 | 8,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Lapangan Oyong, WK Sampang | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | |
| | | Lapangan Wortel, WK Sampang | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | 23,0 | 17,0 | 10,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | |

| NO | PERUNTUKAN KEBUTUHAN PEMBANGKIT | SUMBER GAS BUMI | PEMBELI GAS BUMI | SATUAN | VOLUME GAS BUMI PERTAHUN | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|--------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru, WK Cepu | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | - | - | - | 50,8 | 50,8 | 50,8 | - | - | - | - |
| | | WK West Madura Offshore dan Lapangan Poleng, WK Pertamina EP | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | 100,0 | 100,0 | 76,0 | 74,0 | 72,0 | - | - | - | - | - |
| | | Lapangan MDA, MBH, MDK, WK Madura Strait | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | - | - | 30,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 48,0 | 35,0 | 21,0 |
| | | LNG (Tangguh/Bontang/Masela) | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) via FSRU PLN Jatim | KARGO | - | - | - | - | - | 4,1 | 29,1 | 40,1 | 42,7 | 54,3 |
| 6. | Pesanggaran | LNG Bontang | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | KARGO | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| NO | PERUNTUKAN KEBUTUHAN PEMBANGKIT | SUMBER GAS BUMI | PEMBELI GAS BUMI | SATUAN | VOLUME GAS BUMI PERTAHUN | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2. | PLTMG Bintuni | Blok Tangguh (rencana gas pipa) | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | BBTUD | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |

Catatan:

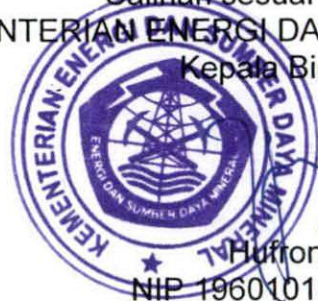
1. *Gas Heating Value* untuk Gas Pipa menggunakan asumsi 1000 BTU/SCF
2. Ukuran kargo untuk LNG Bontang menggunakan asumsi 125000 m³ atau setara 2800 BBTU
3. Ukuran kargo untuk LNG Tangguh menggunakan asumsi 145000 m³ atau setara 3100 BBTU

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Kepala Biro Hukum,

Huffron Asrofi
NIP 1960101519810 3 1002